



## **Analisis Manajemen Keuangan Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)**

**Prita Indriawati<sup>1</sup>, Ririn Suyanti<sup>2</sup>**

Universitas Balikpapan

### **Informasi Artikel**

*Histori Artikel:*

*Submit*           **04 December 2022**

*Accepted*       **15 December 2022**

*Published*      **20 December 2022**

*Email Author:*

[Prita@uniba-bpn.ac.id](mailto:Prita@uniba-bpn.ac.id)

[ririns.chan@gmail.com](mailto:ririns.chan@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Education management itself is seen as a process needed in the world of education to achieve the goals of education itself. The purpose of this paper is to explore school financial management in Vocational High Schools (SMK), as well as to find out the effectiveness of existing financial management in schools. The school used as the object was SMK N 2 Balikpapan with research informants namely the school principal, vice principal for finance, school treasurer, and committee. Based on the research, it was found that the main source of school finance came from BOS funds. The management process begins with deliberations and holding meetings of all teachers and employees with the process of preparing the RKAS and preparing the RAB, based on the plans needed by the school which will first be considered by the School Committee. Realization of school financial management sourced from BOS funds and school committee funds in Vocational High Schools for the 2021/2022 academic year has been carried out efficiently financial While the inhibiting factor is still a lack of BOS funds and school committee funds provided to support the process of school facilities and infrastructure or in other words not in accordance with the previous plan for its realization.*

**Keyword**– *Management, Finance, Financing*

### **ABSTRAK**

Manajemen pendidikan sendiri dipandang sebagai suatu proses yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Tujuan dari paper ini adalah untuk mengeksplorasi manajemen keuangan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta untuk mengetahui efektifitas manajemen keuangan yang ada di sekolah. Adapun sekolah yang digunakan sebagai objek adalah SMK N 2 Balikpapan dengan informan penelitian yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang keuangan, bendahara sekolah, dan komite. Berdasarkan penelitian diperoleh temuan bahwa sumber utama keuangan sekolah berasal dari dana BOS. Adapun proses pengelolaan diawali dengan

musyawarah dan mengadakan rapat seluruh guru dan karyawan dengan proses penyusunan RKAS dan penyusunan RAB, berdasarkan rencana-rencana yang dibutuhkan sekolah yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan Komite Sekolah. Realisasi pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana BOS dan dana komite sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022 telah dilakukan secara efisiensi. Faktor pendukung pengelolaan keuangan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan dapat dilihat dari sisi perencanaan dan besarnya dukungan dewan guru dan kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan. Sedangkan faktor penghambat masih kurangnya dana BOS dan dana komite sekolah yang diberikan untuk menunjang kegiatan proses sarana dan prasarana sekolah atau dengan kata lain tidak sesuai dengan rencana yang sebelumnya terhadap realisasinya.

**Kata Kunci** – Manajemen, Keuangan, Pembiayaan

---

## PENDAHULUAN

Manajemen pendidikan sendiri dipandang sebagai suatu proses yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Sementara proses yang dimaksud adalah melalui proses perencanaan hingga proses pengontrolan sumber daya agar proses-proses tersebut dapat berjalan efektif. Dalam manajemen pendidikan, manajemen pembiayaan dapat dikatakan sendiri dalam manajemen pendidikan karena peran krusialnya. Hal tersebut karena dalam menjalankan kegiatan pendidikan seluruhnya membutuhkan anggaran dana, sehingga menjadi penting pengelolaan anggaran tersebut untuk mendapatkan keefektifan (Syafaruddin et al., 2016). Oleh karena itu manajemen pembiayaan pendidikan menjadi faktor pendukung yang penting dalam penentuan mutu dari lembaga pendidikan. Dengan demikian, pembiayaan seharusnya dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sebab pembiayaan merupakan salah satu sumber daya penting dalam pendidikan. Di sisi lain, program pembiayaan pendidikan dapat mendorong perubahan perilaku. (Azhari dan Kurniady, 2016)

Salah satu jenis pembiayaan pendidikan adalah pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah telah memprioritaskan beberapa program dalam pembangunan, seperti untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan bantuan anggaran yang cukup besar adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Mahulauw et al., 2016). Alokasi dana pemerintah dalam bidang pendidikan dalam bentuk dana BOS merupakan konsekuensi dari berkurangnya subsidi di sektor lain, sehingga bidang pendidikan mendapatkan kucuran anggaran yang cukup dalam membiayai aktivitas pendidikan (Ismail & Sumaila, 2020). Anggaran pendidikan yang dialokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan mengalokasikan dana bagi sektor pendidikan, maka pemerintah menunjukkan perhatian pada bidang pendidikan sebagai bidang penting dalam pembangunan bangsa. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Akan tetapi, kelemahan mendasar pendidikan saat ini terletak pada bidang manajemen dan ketatalaksanaan sekolah. Sementara itu (Adillah 2016). dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam perencanaan anggaran kepala sekolah belum menyertakan semua dewan guru khususnya dalam penyusunan RAPBS sehingga pelaksanaan pembiayaan sekolah dapat dikatakan tidak

transparan. Upaya untuk mengatasi kekurangan dana sekolah adalah dengan cara meminjam dulu dana kepada pihak lainnya dan juga koperasi sekolah. Faktor penghambat yang ditemukan yaitu kurangnya tenaga guru yang sesuai dengan bidangnya, bendaharawan sekolah direkrut dari guru karena tidak ada jurusan yang khusus untuk bendaharawan. Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah adalah oleh pengawas dari badan pengawas daerah. Maka tidak heran bahwa ketersediaan anggaran dan dana tidak selamanya berbanding lurus dengan tercapainya tujuan pendidikan. Karena pada beberapa kasus terdapat penyalahgunaan anggaran dana BOS. Penyalahgunaan atau kesalahan dalam pengelolaan merupakan indikasi bahwa dana BOS perlu dikelola dengan baik dan profesional. Bisa jadi inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa pendidikan di Indonesia masih belum menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Oleh karena itu, pengelola keuangan di sekolah perlu dilatih untuk menerapkan manajemen pembiayaan, sebab hal ini terkait dengan pengelolaan manajemen pembiayaan yang efektif (Mannuhung, 2019).

Sosialisasi dana BOS ini belum dilakukan dengan baik. Penyimpangan dana BOS pun terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Penyimpangan terjadi karena ketidaktahuan orang tua tentang BOS. Kurangnya informasi ini dimanfaatkan oleh pihak sekolah/madrasah untuk memungut biaya dari siswa yang sebenarnya dapat ditutupi dari BOS (Ika, 2019). Penyusunan rencana penggunaan BOS yang diajukan oleh sekolah/madrasah tidak mengikutsertakan wali murid dan tidak dicantumkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M). Hal ini mengakibatkan banyak orang tua yang tidak mengetahui BOS maupun penggunaannya. Pada tingkat SD/MI ataupun SMK/MTs dan sederajat, pungutan sebelum serta sesudah ada dana BOS tetap marak. Padahal, logikanya, tambahan anggaran paling tidak dapat membuat biaya penyelenggaraan sekolah/madrasah lebih murah. Besarnya dana yang belum termanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) menggambarkan sejak program BOS diluncurkan tahun 2005, pungutan liar dan penyimpangan membersamai. Sudah menjadi simbiosis mutualisme antara sekolah dan dinas pendidikan dan pihak terkait berkenaan penyuntatan dana BOS demi kelancaran cairnya dana. Oleh karena itu, dibutuhkan kehendak, kemauan, kepedulian dan partisipasi aktif stakeholder pendidikan dalam mengawal BOS.

Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai Tren Penindakan Kasus Korupsi yang dirilis setiap tahun menunjukkan bahwa korupsi sektor pendidikan konsisten menjadi salah satu sektor yang paling banyak ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Setidaknya dari 2016 hingga 2021 semester 1, korupsi sektor pendidikan masuk dalam lima besar korupsi berdasarkan sektor, bersama dengan sektor anggaran desa, pemerintahan, transportasi, dan perbankan. Meski terdapat faktor keaktifan dan fokus aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan, data tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih menjadi ladang korupsi. Bahkan di tengah pandemi Covid-19, korupsi sektor pendidikan tak berhenti (Indonesian Corruption Watch, 2021) (Ilahi & Widowaty, 2021). Lebih lanjut ICW mengkaji korupsi di sektor pendidikan masih marak terjadi. Selama enam tahun ke belakang, yaitu 2016 hingga September 2021, aparat penegak hukum telah menindak sedikitnya 240 kasus korupsi sektor pendidikan. Korupsi ini terjadi dalam rentang waktu tahun 2007 hingga September 2021 dan menimbulkan kerugian negara sedikitnya Rp 1.605.417.902.150,-.

Dari beberapa temuan terhadap kasus dan permasalahan yang terjadi diatas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana BOS pada tingkat Sekolah/madrasah belum berjalan secara efektif sesuai dengan sasaran dan tujuannya serta pengelolaannya belum mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang merupakan bagian dari prinsip dasar untuk

mewujudkan good governance. Pengelolaan dana BOS di SD/MI tersebut harus dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan akses pelayanan pendidikan khususnya masyarakat miskin, serta dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, hal ini mengingat bahwa salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI dan sederajat. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka pada penelitian ini, peneliti ingin mengungkap secara mendalam tentang bagaimana efektifitas manajemen keuangan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana metode penelitian kualitatif suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan melakukan penelitian yang aktual mengenai fakta-fakta yang ada (Rukajat, 2018).

Maka penelitian menggunakan dengan menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian yang akan mendeskripsikan atau menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan pernyataan terhadap keberadaan, sehingga diperoleh data primer yang menunjang penyusunan laporan ini. Data-data yang diperoleh selama penelitian ini akan diolah, dianalisis, dan diproses dengan teori-teori yang telah dipelajari, sehingga dapat memperjelas gambaran mengenai objek tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti (DJULAEKA & DEVI RAHAYU, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perencanaan Keuangan Sekolah**

Berdasarkan hasil wawancara yang terkait dengan perencanaan keuangan sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan bahwa hal yang pertama dilakukan adalah mengadakan suatu rapat untuk membahas suatu tujuan strategis untuk jangka waktu tertentu. Perencanaan diawali dengan proses penyusunan RKAS dan penyusunan RAB. Data mengenai penyusunan RKAS Tahun Pelajaran 2021/2022 diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, dan Komite Sekolah. Proses penyusunan diawali dengan mengumpulkan kebutuhan dari masing-masing sumber daya manusia, kemudian akan diajukan kepada Komite Sekolah. Kepala Komite Sekolah terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Ketua Tata Usaha.

Tim anggaran sekolah akan membuat penyusunan konsep perencanaan penyaluran dana sekolah yang terdiri dari Dana Bantuan Operasional Sekolah mengenai pemasukan dan pengeluaran APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah), dan akan dilakukan sosialisasi dengan Komite Sekolah untuk dilakukan pertimbangan mengenai pengeluaran yang telah direncanakan oleh tim anggaran. Komite Sekolah akan memberikan saran atas kegiatan yang perlu dianggarkan dengan segera dan yang tidak dapat dianggarkan dengan segera.

Hasil penyusunan APBS dengan dana BOS sekolah yang telah dimusyawarahkan dengan Komite Sekolah, selanjutnya disosialisasikan kepada guru dan karyawan/staf di Sekolah Menengah Kejuruan. Berikut hasil wawancara dengan pengurus sekolah di bawah ini.

Penggunaan dana tersebut disesuaikan kebutuhan dari sekolah, seperti kebutuhan administrasi/alat tulis kantor, penggunaan pembiayaan konsumsi rapat komite sekolah dengan orang tua murid transportasi dalam rangka melaksanakan tugas, dan atau kegiatan lainnya yang

disepakati oleh Komite Sekolah dan karyawan/staf dan para orang tua wali murid serta laporan di Dinas Pendidikan. Proses penyusunan RKAS anggaran perencanaan dana BOS sekolah diawali dengan membuat rapat untuk mengumpulkan rencana-rencana kebutuhan yang diperlukan dari semua guru dan karyawan, kemudian dilakukan pertimbangan kepada komite sekolah untuk dana BOS berpanduan juga kepada petunjuk teknis BOS sekolah.

Data penyusunan RAB dana BOS tahun anggaran 2021/2022 diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sekolah SD, Kepala Sekolah SMK, Bendahara, Guru dan dokumentasi. Proses penyusunan RAB dana BOS dan dana komite sekolah tahun anggaran 2021/2022 dilakukan bersama dengan penyusunan RKAS. Sekolah melakukan penyusunan RAB dana BOS sekolah tahun anggaran 2021/2022 didasarkan atas kebutuhan penyaluran tahun anggaran 2021/2022. Kegiatan yang dapat didanai menggunakan tahun anggaran 2021/2022 adalah kegiatan operasional sekolah dan non-operasional yang disekolah Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga sekolah dapat dengan mudah melakukan penyusunan item-item perencanaan dana BOS sekolah yang akan digunakan. Penyusunan RAB dana BOS sekolah tahun anggaran 2021/2022 Sekolah Menengah Kejuruan untuk disepakati bersama seluruh guru, karyawan beserta komite sekolah, yaitu dengan memperkirakan jumlah pengumpulan dana BOS sekolah dari orang tua/wali peserta didik tahun ajaran tahun anggaran 2021/2022.

Dana BOS sekolah tahun anggaran 2021/2022 Sekolah Menengah Kejuruan yang diperoleh sekolah didasarkan atas dana yang diberikan oleh pemerintah. Pendataan setiap bulannya dilihat dari dana yang dikumpulkan oleh komite sekolah dan Bendahara BOS. Kemudian direkap oleh Komite dan Bendahara BOS sekolah Sekolah Menengah Kejuruan. Pelaksanaan pengelolaan dana BOS sekolah tahun anggaran 2021/2022 Sekolah Menengah Kejuruan yang dilaksanakan, dilakukan oleh tim komite sekolah. Tim komite sekolah terdiri dari Ketua Yayasan, Kepala Sekolah SD dan SMK, Bendahara Sekolah, beserta seluruh karyawan dan guru di Sekolah Menengah Kejuruan yang berkaitan sesuai keperluan dana komite sekolah yang telah disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana BOS sekolah tahun 2021/2022 Sekolah Menengah Kejuruan.

Berdasarkan rangkuman hasil wawancara kepada responden yaitu Ketua Yayasan, Kepala Sekolah SD, Kepala Sekolah SMK, Bendahara dan Guru diketahui kesamaan penjelasan responden, bahwa penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana BOS sekolah tahun ajaran 2021/2022 dilaksanakan bersama dengan penyusunan RKAS tahun 2021/2022. Sekolah melakukan pendataan siswa setiap semesternya, dan mengumpulkan dana BOS sekolah. Dalam hal ini sekolah memiliki manajemen dana BOS dan dana komite sekolah tahun anggaran 2021/2022 di Sekolah Menengah Kejuruan.

### **Realisasi Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah**

#### **a. Realisasi Penggunaan Dana**

Realisasi penggunaan dana bantuan dana BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022, terdiri dari beberapa bagian yaitu diawali dari tahap penggunaan dana BOS sekolah Sekolah Menengah Kejuruan dan pembukuan dana BOS sekolah Sekolah Menengah Kejuruan.

Data realisasi penggunaan dana BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022 diperoleh dari wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Karyawan, Guru dan Komite Sekolah. Sekolah yang menerima dana bantuan BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022 tiap satu semester sekali. Penggunaan dana bantuan BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022 tercatat

dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022.

Realisasi penggunaan dana BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022 untuk bulan pertama sampai bulan selanjutnya disesuaikan dengan bantuan dana BOS. Penggunaan dana BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022 diperoleh dari wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, dan Komite Sekolah, dokumen, dan observasi. Dana BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022 hanya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional. Proses penggunaan dana BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022 dilakukan dengan RAB BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022 menjelaskan penggunaan dana untuk periode pertama dan periode kedua terdapat perbedaan dikarenakan terdapat perbedaan kebutuhan yang perlu dianggarkan dengan dana BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022.

Kegiatan operasional yang dibiayai menggunakan dana BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022 dijabarkan bahwa penggunaan dana BOS digunakan untuk tagihan listrik, tagihan internet, pembelian ATK, honorium pegawai, biaya perangko dan materai, biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih, biaya habis pakai alat kesehatan, biaya bahan obat-obatan, tagihan air, biaya jasa keamanan dan kebersihan kantor, biaya jasa tenaga administrasi, biaya cetak, biaya penggandaan, biaya modal, biaya modal peralatan dan mesin, biaya modal aset tetap pengadaan buku, biaya penggandaan, biaya mid semester, biaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, biaya pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, belanja sosialisasi, k3s, petugas angkut sampah, pengembangan standar pengelolaan, penerimaan peserta didik baru, brosur PPDB, spanduk PPDB dan lain-lain yang dapat dilihat di Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Kepala Sekolah dan Komite Sekolah terdapat kesamaan jawaban dalam menanggapi aspek penggunaan dana BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022, harus berdasarkan atas rencana anggaran yang telah dibuat setelah dirapatkan dan dimusyawarahkan. Dana BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022 yang iuran wali/orang tua siswa yang dipungut setiap bulan persiswa berbeda-beda sekitar Rp. 80.000 sampai dengan Rp. 100.000 tergantung kondisi perekonomian keluarganya dan dana BOS yang berasal dari pemerintah belum memenuhi kebutuhan operasional sekolah secara keseluruhan, namun adanya dana BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022 telah banyak membantu banyak kebutuhan operasional sekolah.

#### b. Realisasi Pembukuan

Data mengenai pembukuan dana BOS komite sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022 diperoleh dari wawancara Kepala Sekolah SD, Kepala Sekolah SMK, Bendahara, Guru, dan dokumentasi. Pembukuan keseluruhan penggunaan dana, disusun oleh Bendahara Sekolah. Rekap pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Sekolah, kemudian diserahkan ke Bendahara dana BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan untuk dilakukan update data setiap bulan terkait dengan pengeluaran yang bersumber khusus penggunaan dana BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan.

Pembukuan yang dibuat oleh Bendahara dana BOS di sekolah Sekolah Menengah

Kejuruan, terdiri dari buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku harian. Pelaksanaan pembukuan tim belanja barang harus menyertakan bukti transaksi terhadap dana yang telah dikeluarkan. Bukti fisik atas transaksi tersebut berguna untuk kegiatan Pelaporan BOS dan di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022, sebagai pertanggungjawaban kepada komite sekolah, pengawas BOS yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, Bendahara, dan komite sekolah kesamaan jawaban dalam menanggapi pelaksanaan dana BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022 adalah pelaksanaan dilakukan rutin setiap bulannya dan setiap pembukuan akan disertakan bukti fisik transaksi baik dalam hal pembayaran dari orang tua/wali siswa atau pembukuan pengeluaran dan penggunaan dana BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022.

Keuangan sekolah adalah sesuatu yang sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan sekolah, karena setiap kegiatan sekolah membutuhkan dana untuk meningkatkan kualitas dalam hal proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, dan pelaporan.

Pengelolaan keuangan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan juga dilakukan perencanaan pengelolaan keuangan sekolah baik bersumber dari dana BOS atau komite sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022 diawali dengan proses penyusunan RKAS dan penyusunan RAB. Setelah perencanaan dilakukan, dilakukan pula penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan penggunaan dan terakhir dilakukan pembukuan.

Dalam melaksanakan tugasnya, bendahara Sekolah Menengah Kejuruan tidak menggunakan buku-buku, tetapi menggunakan pencatatan pada buku pembantu kas, buku kas umum, dan buku pembantu bank. Dalam realisasi anggaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran Sekolah Menengah Kejuruan yang telah disusun dalam RKAS berada di bawah tanggung jawab masing-masing pelaksana program delapan Standar Nasional Pendidikan. Program-program yang tercantum pada RKAS adalah hasil dari pengajuan proposal kegiatan kepada penanggung jawab program. Setelah dianggarkan, maka pelaksana dapat mengambil dana yang diperlukan ke bendahara atas persetujuan Kepala Sekolah. Kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan, dituangkan ke dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan.

Realisasi pengelolaan dana pendidikan harus mengacu pada prinsip-prinsip seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 pasal 59 dalam pengelolaan dana pendidikan yaitu prinsip keadilan terletak pada pengelolaan dana BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022 dilakukan dengan musyawarah dan kesepakatan semua karyawan dan guru beserta komite sekolah, juga prinsip efisiensi dengan menggunakan pengeluaran dana BOS sekolah sesuai dengan kebutuhan. Prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas dengan adanya rapat-rapat dan pembukuan yang bisa menjadi informasi bagi pemakainya dan pelaporan pada Dinas Pendidikan.

#### c. Faktor Pendukung dan Penghambat

Setiap proses kerja akan berhasil jika dipengaruhi faktor-faktor pendukung. Tetapi proses kerja tersebut bisa juga kurang berhasil secara efektif dan efisiensi, atau bahkan tidak berhasil sama sekali jika faktor penghambat lebih besar daripada faktor pendukung. Demikian halnya pengelolaan dana BOS di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran

2021/2022 dalam menjalankan program kerjanya tentu tidak luput dari faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaannya.

“Faktor pendukung pengelolaan keuangan sekolah Sekolah Menengah Kejuruan adalah besarnya dukungan dari wali murid, dewan guru, dan kepala sekolah di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan terhadap realisasi pengelolaan keuangan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022. Besarnya dukungan ini akan memperlancarkan setiap realisasi pengelolaan keuangan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022. Karena tanpa dukungan baik berupa pemikiran, tenaga maupun dana BOS mustahil realisasi pengelolaan keuangan sekolah dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Sedangkan faktor penghambat masih banyak para orang tua/wali murid dimana murid yang menyumbangkan dana komite sekolah, bahkan ada yang sama sekali tidak membayarkannya. Hal tersebut cukup menghambat proses pengelolaan keuangan sekolah baik dari dana BOS dan dana komite sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan. Hal tersebut tentunya juga berimbas kepada tidak terpenuhinya dana BOS sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan dalam realisasi anggaran yang telah disepakati.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah SMK di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan sebagai berikut:

“Faktor pendukung pengelolaan keuangan sekolah baik yang bersumber dari dana BOS maupun dana Komite Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan yaitu bahwa semua pada saat perencanaan realisasi pengelolaan keuangan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan semua para pimpinan Sekolah Menengah Kejuruan beserta guru dan staf ikut terlibat dalam melakukan realisasi anggaran tahun 2021/2022 sehingga semua realisasi anggaran dan jumlah yang akan dikeluarkan telah disetujui semua pihak. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih kurang cukupnya dana BOS yang didapatkan oleh sekolah Sekolah Menengah Kejuruan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD dan Kepala Sekolah SMK ada persamaan jawaban tetapi sedikit berbeda dalam memberikan jawaban terhadap faktor penghambat dan pendukung pengelolaan dana di sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022 adalah faktor pendukung berasal dari pemerintah yang memberikan dana bantuan BOS untuk kebutuhan operasional sekolah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022. Juga keterlibatan seluruh guru, pimpinan dan staf Sekolah Menengah Kejuruan dalam mengikuti perencanaan realisasi pengelolaan dana BOS sekolah. Sedangkan faktor penghambat yang berasal tidak lancarnya pengumpulan iuran tersebut oleh pihak orang tua/wali murid.

Sedangkan wawancara dengan Bendahara sekolah Sekolah Menengah Kejuruan sebagai berikut:

“Kalau faktor pendukung pengelolaan keuangan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan ini dapat dilihat dari sisi perencanaannya. Jadi menurut saya kalau perencanaan sudah sesuai dengan rencana yang ingin direalisasikan maka itu merupakan faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan sekolah. Sedangkan kalau perencanaannya di luar rencana yang sudah direncanakan maka itu menurut saya faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan sekolah”.

Dari ketiga jawaban hasil wawancara dari Kepala Sekolah SMK, Komite Sekolah dan Bendahara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat dalam

pengelolaan keuangan sekolah tidak hanya dilihat dari sisi keuangan saja seperti dana BOS dan dana komite sekolah serta manajemen yang terlibat di dalamnya, namun juga dilihat dari sisi perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Kalau perencanaan sudah sesuai dengan rencana dan realisasinya maka dapat mempermudah dan mendukung pengelolaan keuangan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan.

## SIMPULAN

Proses perencanaan pengelolaan keuangan sekolah yang dapat dilihat dari sumber keuangan dana BOS dan dana komite sekolah diawali dengan musyawarah dan mengadakan rapat seluruh guru dan karyawan dengan proses penyusunan RKAS dan penyusunan RAB, berdasarkan perencanaan yang dibutuhkan sekolah yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan Komite Sekolah. Realisasi pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana BOS dan dana komite sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022 telah dilakukan secara efisiensi dan sesuai dengan prinsip-prinsip seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 pasal 59, hal ini dapat dilihat dari prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. Faktor pendukung pengelolaan keuangan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Kecamatan Sunggal tahun pelajaran 2021/2022 dapat dilihat dari sisi perencanaan dan besarnya dukungan dewan guru dan kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana BOS dan dana komite sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022. Sedangkan faktor penghambat masih kurangnya dana BOS dan dana komite sekolah yang diberikan untuk menunjang kegiatan proses sarana dan prasarana sekolah atau dengan kata lain tidak sesuai dengan rencana yang sebelumnya terhadap realisasinya

## BIBLIOGRAFI

- Adillah, Ghazali. "Manajemen keuangan sekolah." *Manajer Pendidikan* 10.4 (2016).
- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2016). Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 23(2).
- DJULAEKA, S. H., & DEVI RAHAYU, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Ika, A. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar di Kecamatan Bulukerto*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Ilahi, A. H. A., & Widowaty, Y. (2021). The Optimization of Corruption Deterrence during the Covid-19 Pandemic. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 8(1), 71–91.
- Ismail, F., & Sumaila, N. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 1–18.
- Mahulauw, A. K., Santosa, D. B., & Mahardika, P. (2016). Pengaruh Pengeluaran Kesehatan dan Pendidikan Serta Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 122–148.
- Mannuhung, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Ibtidaiyah di Kota Makassar. *Jurnal Andi Djemma*, 3(1), 98-115.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish.
- Syafaruddin, S., Asrul, A., Mesiono, M., Wijaya, C., & Usiono, U. (2016). *Inovasi pendidikan: suatu analisis terhadap kebijakan baru pendidikan*.

**Copyright holder:**

Prita Indriawati, Ririn Suyanti (2022)

**First publication right:**

ETNIK : Jurnal Ekonomi dan Teknik